

Artikel Pengabdian kepada Masyarakat

Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa untuk Akuntabilitas yang Lebih Baik

Ali Tafriji Biswan^{1*}, Tjahyo Winarto², Yanuar Fiskar Imapo², Alim Fatimah², Azizah Mariana²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 02 Januari 2026
Revisi Akhir: 25 Januari 2026
Diterbitkan Online: 13 Februari 2026

KATA KUNCI

Akuntabilitas
Asistensi
Pengelolaan Keuangan Desa
SISKEUDES
Tata Kelola Desa

KORESPONDENSI

Phone: +62 818-071-56866
E-mail: atb.biswan@upnvj.ac.id

A B S T R A K

Pengelolaan keuangan desa merupakan komponen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Namun, praktik di Desa Cibugel, Kabupaten Tangerang, masih menghadapi kendala serius, antara lain belum adanya operator SISKEUDES yang definitif, sering terjadi kesalahan pengkodean akun, keterlambatan penyusunan laporan realisasi dan SPJ, serta ketiadaan modul panduan internal yang baku. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan asistensi penguatan kapasitas perangkat desa dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES melalui proses pendampingan yang partisipatif dan berbasis praktik langsung. Metode pelaksanaan terdiri dari empat tahap: observasi dan identifikasi masalah, perancangan solusi dan modul, implementasi pelatihan lapangan, serta evaluasi dan penyerahan luaran. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kompetensi perangkat desa: kesalahan input transaksi menurun, keterlambatan laporan berkurang, dan keterlibatan lintas perangkat meningkat. Selain itu, modul panduan SISKEUDES berhasil disusun dan digunakan sebagai standar internal desa. Temuan ini menegaskan bahwa asistensi berbasis praktik nyata dan kolaborasi perguruan tinggi mampu memperkuat tata kelola keuangan desa, sekaligus menjadi model intervensi yang dapat direplikasi di desa lain dengan kondisi serupa.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, keuangan desa mencakup siklus yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Ketertiban dalam setiap tahapan tersebut menjadi prasyarat penting bagi kualitas laporan keuangan desa serta legitimasi penggunaan dana publik di tingkat lokal (Salman, 2024).

Untuk mendukung tata kelola tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai aplikasi standar nasional pengelolaan keuangan desa. SISKEUDES dirancang untuk membantu desa dalam menyusun APBDes, mencatat transaksi keuangan, serta menghasilkan laporan keuangan secara sistematis dan terstandar. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES berkontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Danial Kesa et al., 2023; Mahin, 2024).

Meskipun demikian, efektivitas implementasi SISKEUDES sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan lingkungan kerja desa. Penelitian Ningsih dan Anggraeni (2024) menegaskan bahwa peran aparat desa menjadi faktor kunci dalam memastikan sistem keuangan desa berjalan optimal. Tanpa kompetensi teknis yang memadai, aplikasi SISKEUDES berpotensi hanya menjadi alat administratif formal tanpa meningkatkan kualitas tata kelola secara substantif. Hal ini diperkuat oleh temuan Agustina dan Nurabiah (2024) yang menunjukkan bahwa kualitas implementasi SISKEUDES sangat bergantung pada pemahaman pengguna terhadap alur dan logika akuntansi desa.

Berbagai studi juga mencatat masih adanya kesenjangan antara ketersediaan aplikasi SISKEUDES dan praktik pengelolaan keuangan desa di lapangan. Desa sering menghadapi kendala berupa kesalahan input transaksi, keterlambatan penyusunan laporan, serta ketergantungan pada satu operator tertentu (Pramesti et al., 2025; Fadila & Pravitasari, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan desa belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan pembiasaan praktik administrasi yang tertib.

Dari sisi output, kualitas laporan keuangan desa juga dipengaruhi oleh sejauh mana SISKEUDES digunakan secara konsisten dan sesuai prosedur. Trisnawati et al. (2024) menemukan bahwa implementasi SISKEUDES berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur desa dan kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, keberadaan aplikasi saja tidak cukup tanpa pendampingan dan pembelajaran berbasis praktik.

Kondisi serupa ditemukan di Desa Cibugel, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Berdasarkan observasi awal, pengelolaan keuangan desa menggunakan SISKEUDES masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum adanya operator definitif, kesalahan pengkodean akun belanja, serta keterlambatan penyusunan SPJ dan laporan realisasi. Praktik pengelolaan keuangan juga sangat bergantung pada pengalaman individu, bukan pada panduan baku yang terdokumentasi. Situasi ini mencerminkan adanya *gap* antara tuntutan akuntabilitas keuangan desa dan kapasitas operasional perangkat desa.

Literatur menegaskan bahwa untuk menutup *gap* tersebut, diperlukan pendekatan asistensi yang bersifat partisipatif dan berbasis praktik langsung. Gundul (2025) serta Susano dan Rachmawati (2024) menekankan bahwa pendampingan teknis yang berkelanjutan mampu meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas keuangan desa secara nyata. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk asistensi pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES menjadi relevan dan mendesak.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan asistensi pengelolaan keuangan desa dan penggunaan aplikasi SISKEUDES melalui pendekatan *learning by doing*. Diharapkan kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis perangkat desa, tetapi juga menghasilkan panduan internal yang kontekstual dan berkelanjutan, sehingga tata kelola keuangan desa menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

METODE PELAKSANA

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang bersifat partisipatif dan kolaboratif. Pendekatan ini menempatkan perangkat desa sebagai mitra aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan, perancangan solusi, pelaksanaan tindakan, hingga evaluasi hasil. PAR dipilih karena dinilai sesuai untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian mitra melalui praktik langsung dan refleksi bersama (Khafsoh & Riani, 2024).

Pendekatan PAR juga menekankan proses *learning by doing*, di mana pembelajaran berlangsung melalui keterlibatan langsung peserta dalam aktivitas nyata yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, pendekatan ini relevan karena penguasaan aplikasi SISKEUDES tidak cukup diperoleh melalui ceramah atau sosialisasi, tetapi memerlukan latihan berulang, pendampingan intensif, dan refleksi atas kesalahan yang muncul selama praktik (Kemmis et al., 2014). Model ini telah banyak digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat karena mampu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan konseptual dan kebutuhan operasional di lapangan.

Secara umum, kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu: (1) observasi dan identifikasi masalah, (2) perancangan solusi dan penyusunan modul pendukung, (3) implementasi dan pelatihan lapangan, serta (4) evaluasi dan penyerahan luaran. Ringkasan tahapan kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian dalam Pendampingan SISKEUDES

No.	Tahap	Uraian Kegiatan
1	Observasi & Identifikasi Masalah	Pengumpulan data awal melalui observasi lapangan, wawancara dengan perangkat desa (Kaur Keuangan, Bendahara Desa, dan Operator SISKEUDES), serta telaah dokumen APBDes, laporan realisasi, dan SPJ. Hasil kegiatan dirangkum dalam matriks permasalahan sebagai dasar intervensi.
2	Perancangan Solusi & Modul Pendukung	Penyusunan modul pelatihan SISKEUDES yang memuat alur input transaksi, contoh kode akun, format laporan, serta simulasi kasus keuangan desa yang disesuaikan dengan kondisi desa.
3	Implementasi & Pelatihan Lapangan	Pelatihan penggunaan SISKEUDES melalui simulasi langsung input transaksi, penyusunan laporan realisasi, dan pembuatan SPJ dengan pendekatan <i>learning by doing</i> di kantor desa.
4	Evaluasi & Penyerahan Luaran	Evaluasi keterampilan perangkat desa melalui praktik mandiri dan diskusi reflektif. Penyerahan modul, contoh laporan, dan panduan internal SISKEUDES sebagai luaran kegiatan.

Tahap pertama adalah observasi dan identifikasi masalah, yang dilakukan melalui kunjungan lapangan dan wawancara dengan perangkat desa terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala nyata dalam penggunaan SISKEUDES, seperti kesalahan pengkodean akun, keterlambatan penyusunan laporan, dan ketergantungan pada operator tertentu. Seluruh temuan tersebut kemudian dianalisis secara partisipatif bersama perangkat desa untuk memastikan kesesuaian antara permasalahan yang dirasakan dan intervensi yang akan dirancang.

Tahap kedua adalah perancangan solusi dan penyusunan modul pendukung. Berdasarkan hasil identifikasi awal, tim pengabdian menyusun modul pelatihan SISKEUDES yang bersifat sederhana, kontekstual, dan mudah dipahami. Modul ini dirancang sebagai panduan internal desa yang dapat digunakan secara berkelanjutan, sebagaimana dianjurkan dalam pendekatan PAR yang menekankan keberlanjutan hasil kegiatan (Khafsoh & Riani, 2024).

Tahap ketiga adalah implementasi dan pelatihan lapangan, yang dilakukan dengan metode *learning by doing*. Perangkat desa secara langsung mempraktikkan input transaksi, penyusunan laporan realisasi, dan pembuatan SPJ menggunakan aplikasi SISKEUDES dengan data riil Desa Cibugel. Pendampingan intensif dilakukan untuk memastikan setiap perangkat memahami alur kerja dan prosedur yang benar.

Tahap keempat adalah evaluasi dan penyerahan luaran. Evaluasi dilakukan melalui praktik mandiri dan diskusi reflektif untuk menilai tingkat keterampilan dan kesiapan perangkat desa. Pendekatan reflektif ini merupakan ciri utama PAR yang bertujuan memperbaiki praktik secara berkelanjutan melalui siklus aksi dan refleksi (Kemmis et al., 2014). Selanjutnya, modul pelatihan dan panduan internal SISKEUDES diserahkan kepada pemerintah desa sebagai luaran kegiatan.

Secara keseluruhan, metode ini menekankan partisipasi aktif, pemecahan masalah nyata, dan pembelajaran berbasis praktik, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola keuangan desa secara tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan desa di Desa Cibugel masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang berimplikasi langsung terhadap kualitas akuntabilitas pemerintahan desa. Pada pertemuan awal dan observasi lapangan, tim pengabdian menemukan adanya kelemahan sistemik yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam satu siklus pengelolaan keuangan desa. Kondisi ini sejalan dengan temuan Danial Kesa et al. (2023) yang menyatakan bahwa kelemahan tata kelola keuangan desa umumnya bukan disebabkan oleh ketiadaan sistem, melainkan oleh keterbatasan kapasitas implementasi di tingkat aparatur desa.

Salah satu permasalahan utama adalah belum definitifnya penunjukan operator SISKEUDES. Dalam praktiknya, pencatatan keuangan desa kerap bergantung pada perangkat yang merangkap tugas administratif lain atau bahkan pada bantuan pihak luar. Ketergantungan ini menyebabkan kesinambungan administrasi keuangan tidak stabil, terutama ketika terjadi rotasi perangkat desa. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Ningsih dan Anggraeni (2024), yang menegaskan bahwa peran aparat desa menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui SISKEUDES.

Permasalahan berikutnya teridentifikasi pada aspek teknis pencatatan transaksi, khususnya dalam penggunaan kode akun belanja dan pendapatan. Tim menemukan cukup banyak kesalahan input, seperti belanja barang dan jasa yang tercatat sebagai belanja modal atau sebaliknya. Kesalahan klasifikasi akun ini tidak hanya berdampak pada ketidaksesuaian laporan realisasi anggaran, tetapi juga berpotensi memunculkan risiko temuan pemeriksaan oleh inspektorat daerah maupun BPKP. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Trisnawati et al. (2024) dan Susano dan Rachmawati (2024) yang menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh pemahaman teknis aparat terhadap struktur akun dan prosedur akuntansi pemerintahan desa.

Selain itu, keterlambatan penyusunan SPJ dan laporan realisasi menjadi permasalahan yang cukup dominan. Perangkat desa belum terbiasa dengan pola pencatatan transaksi secara harian atau periodik, sehingga data keuangan sering kali menumpuk dan baru disusun mendekati batas waktu pelaporan. Pola kerja reaktif semacam ini menyebabkan proses pelaporan menjadi terburu-buru dan rawan kesalahan administratif. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Fadila dan Pravitasari (2022) yang menekankan bahwa tanpa pembiasaan pencatatan rutin, penerapan SISKEUDES cenderung bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mendukung akuntabilitas.

Kelemahan lain yang tidak kalah krusial adalah ketiadaan modul panduan internal pengelolaan keuangan desa dan penggunaan SISKEUDES. Praktik pencatatan dan pelaporan masih sangat bergantung pada pengalaman individu tertentu, bukan pada standar prosedur tertulis yang baku. Hal ini membuat desa rentan kehilangan memori institusional ketika terjadi pergantian operator atau perangkat desa. Agustina dan Nurabiah (2024) menegaskan bahwa keberadaan panduan operasional lokal merupakan faktor penting dalam menjaga konsistensi kualitas pengelolaan keuangan desa, terutama di wilayah dengan dinamika sumber daya manusia yang tinggi.

Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara ketersediaan aplikasi SISKEUDES sebagai instrumen tata kelola keuangan desa dengan kapasitas operasional dan kesiapan sumber daya manusia desa dalam mengimplementasikannya secara optimal. Tanpa adanya intervensi yang terarah dan berbasis praktik, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas tata kelola keuangan desa, mengurangi transparansi publik, serta meningkatkan risiko permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban dana desa, sebagaimana juga disoroti oleh Gundul (2025) dalam evaluasinya terhadap transparansi keuangan desa.

Kegiatan asistensi pengelolaan keuangan desa di Desa Cibugel dilaksanakan secara sistematis melalui empat tahapan utama yang dirancang untuk menjawab permasalahan nyata yang dihadapi perangkat desa dalam praktik pengelolaan keuangan sehari-hari. Tahapan tersebut disusun secara berurutan agar proses pendampingan berjalan terarah, mulai dari pemahaman kondisi awal hingga penguatan kapasitas perangkat desa dalam mengelola keuangan secara mandiri dan berkelanjutan.

Observasi dan Identifikasi Masalah

Tahap pertama adalah observasi dan identifikasi masalah. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Desa Cibugel dan melaksanakan diskusi intensif bersama perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, khususnya Kepala Urusan Keuangan, Bendahara Desa, serta operator SISKEUDES. Diskusi dilakukan secara terbuka untuk menggali praktik pencatatan dan pelaporan keuangan yang selama ini berjalan, termasuk kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES.

Selain diskusi, tim juga melakukan penelaahan terhadap dokumen keuangan desa, meliputi APBDes tahun berjalan, laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya, serta contoh dokumen pertanggungjawaban (SPJ) yang tersedia. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kualitas pencatatan transaksi dan konsistensi pelaporan keuangan desa. Dari hasil telaah dokumen tersebut, tim menemukan adanya pola kesalahan pengkodean akun, khususnya dalam membedakan jenis belanja, keterlambatan penyusunan laporan realisasi, serta lemahnya dokumentasi bukti transaksi yang mendukung setiap pengeluaran.

Temuan-temuan pada tahap observasi ini kemudian dicatat dan dirumuskan dalam bentuk daftar permasalahan sebagai dasar penyusunan strategi pendampingan pada tahap berikutnya. Dengan demikian, tahap observasi dan identifikasi masalah tidak hanya berfungsi sebagai pengumpulan data awal, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa kegiatan asistensi yang dilakukan benar-benar relevan dengan kebutuhan dan kondisi riil Desa Cibugel.



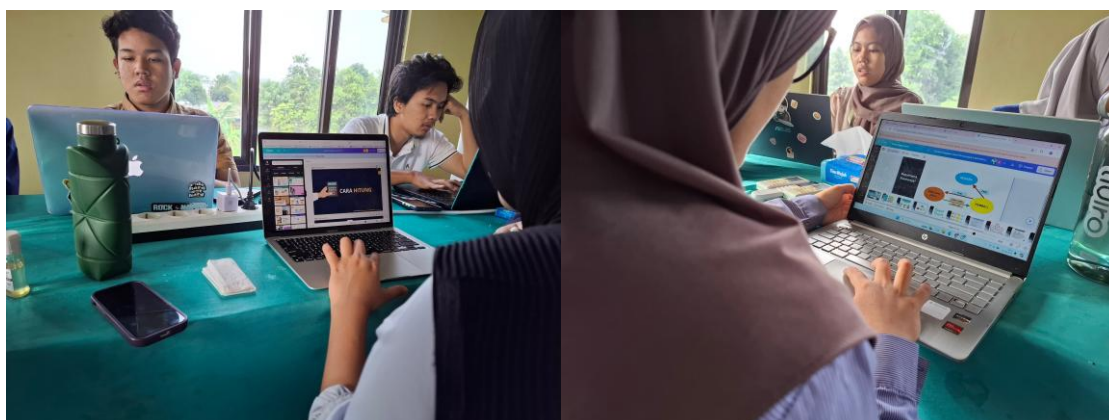
Gambar 1. Diskusi Awal dengan Perangkat Desa dalam Identifikasi Permasalahan SISKEUDES (Dokumentasi laporan: forum diskusi tim pengabdian dan perangkat desa di balai desa).

Perancangan Solusi dan Modul Pendukung

Tahap kedua adalah perancangan solusi dan penyusunan modul pendukung. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, tim pengabdian menyusun modul pelatihan internal SISKEUDES yang bersifat praktis dan mudah digunakan oleh perangkat desa. Modul ini dirancang sebagai panduan kerja operasional, bukan sekadar bahan teoritis, sehingga dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa sehari-hari.

Modul disusun mengikuti alur pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan anggaran, penginputan APBDes, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan realisasi dan pertanggungjawaban. Selain itu, modul dilengkapi dengan panduan pengkodean akun belanja dan pendapatan yang disertai contoh kasus riil, khususnya transaksi yang sering terjadi di Desa Cibugel, seperti belanja barang dan jasa, kegiatan, serta honorarium.

Untuk mendukung tertib administrasi, modul juga memuat format SPJ sederhana yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa, serta contoh simulasi transaksi yang digunakan sebagai bahan latihan pada tahap pelatihan lapangan. Penyusunan modul ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan input, meningkatkan konsistensi pencatatan, dan menyediakan rujukan internal yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh perangkat desa.



Gambar 2. Penyusunan Modul (Bahan) Asistensi/Pelatihan SISKEUDES (Dokumentasi laporan: tim pengmas menyiapkan bahan tayang dan modul panduan untuk perangkat desa).

Implementasi dan Pelatihan Lapangan

Tahap ketiga adalah implementasi dan pelatihan lapangan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara partisipatif di Kantor Desa Cibugel dengan melibatkan perangkat desa yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan. Pada tahap ini,

perangkat desa tidak hanya menerima penjelasan, tetapi mempraktikkan secara langsung penggunaan aplikasi SISKEUDES melalui simulasi input transaksi keuangan desa.

Pelatihan difokuskan pada pencatatan transaksi yang umum terjadi, mulai dari input belanja kegiatan, belanja barang dan jasa, hingga penyusunan laporan realisasi anggaran bulanan. Seluruh praktik dilakukan menggunakan data riil APBDes Desa Cibugel agar materi pelatihan relevan dengan kondisi nyata yang dihadapi perangkat desa. Tim pengabdian mendampingi secara langsung setiap tahapan praktik, memastikan prosedur input dilakukan dengan benar dan sesuai alur aplikasi.

Penerapan metode *learning by doing* membuat perangkat desa lebih cepat memahami proses pengelolaan keuangan berbasis SISKEUDES, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dalam mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Melalui praktik langsung ini, perangkat desa mulai terbiasa dengan ritme pencatatan transaksi dan penyusunan laporan secara periodik, yang menjadi fondasi penting bagi tertib administrasi keuangan desa.



Gambar 3. Praktik Input Transaksi Keuangan Desa di Aplikasi SISKEUDES
(Dokumentasi laporan: perangkat desa didampingi tim pengmas melakukan simulasi aplikasi)

Hasil tahap ini menunjukkan peningkatan keterampilan signifikan. Perangkat desa mulai mampu membedakan kode akun belanja barang/jasa dengan belanja modal, serta berhasil menyusun draft laporan realisasi sederhana.

Evaluasi dan Penyerahan Luaran

Tahap akhir kegiatan berupa evaluasi hasil melalui forum reflektif yang melibatkan perangkat desa. Pada tahap ini, perangkat desa diminta menyusun laporan keuangan bulanan secara mandiri sebagai uji pemahaman terhadap penggunaan aplikasi SISKEUDES dan alur pengelolaan keuangan desa. Proses evaluasi dilanjutkan dengan diskusi terbuka untuk meninjau berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam praktik, seperti keterbatasan perangkat komputer dan kendala jaringan internet yang memengaruhi kelancaran input dan pelaporan data keuangan.

Sebagai luaran dari kegiatan pendampingan, tim pengabdian menyerahkan sejumlah dokumen pendukung yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh pemerintah desa. Luaran tersebut meliputi modul internal SISKEUDES Desa Cibugel sebagai panduan operasional, contoh laporan realisasi bulanan yang dapat dijadikan acuan, serta panduan pengkodean akun sederhana untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi transaksi. Luaran ini diharapkan dapat memperkuat konsistensi praktik pengelolaan keuangan desa dan menjaga keberlanjutan hasil pendampingan setelah kegiatan pengabdian berakhir.



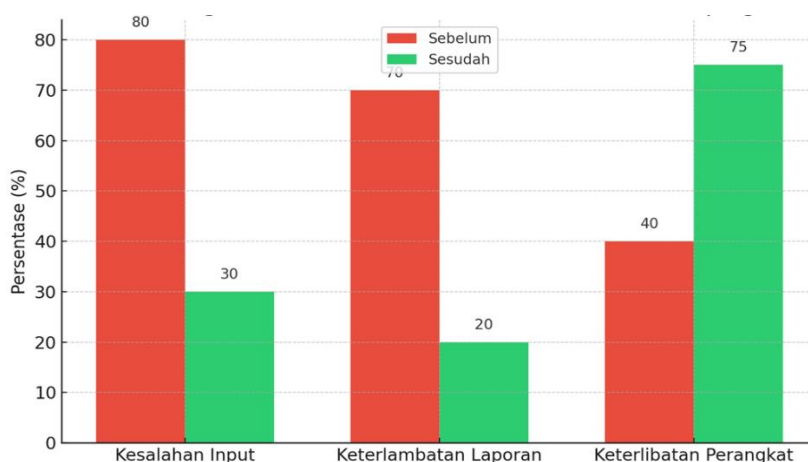
Gambar 4. Serah Terima Modul Panduan SISKEUDES Kepada Perangkat Desa (Dokumentasi laporan: penyerahan modul oleh tim pengmas kepada perangkat desa).

Analisis *gap* dilakukan dengan membandingkan kondisi awal, intervensi, dan hasil. Hasilnya terangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Ikhtisar Permasalahan, Intervensi, dan Hasil Pendampingan SISKEUDES

No	Permasalahan	Kondisi Awal	Intervensi	Status Hasil
1	Operator SISKEUDES	Belum definitif, bergantung pihak luar	Pelatihan operator lokal	Operator lokal mulai mandiri
2	Kesalahan input kode akun	Sering keliru belanja modal vs barang	Modul kode akun & simulasi transaksi	Kesalahan berkurang signifikan
3	Keterlambatan laporan	Laporan SPJ & realisasi terlambat	Simulasi penyusunan laporan bulanan	Laporan dapat dibuat tepat waktu
4	Dokumentasi panduan	Tidak ada SOP/modul internal	Penyusunan modul SISKEUDES Desa Cibugel	Modul tersedia & dipakai rutin
5	Infrastruktur IT	Komputer terbatas, internet tidak stabil	Rekomendasi ke pemdes & kecamatan	Masih jadi PR, perlu dukungan lanjutan

Tabel ini menunjukkan sebagian besar *gap* berhasil ditutup melalui pendampingan, meskipun aspek infrastruktur masih memerlukan intervensi pihak kabupaten/kecamatan. Selain tabel, evaluasi kuantitatif juga dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan. Grafik pada Gambar 5 memperlihatkan secara jelas dampak intervensi pendampingan terhadap tiga indikator utama: kesalahan input transaksi, keterlambatan laporan, dan keterlibatan perangkat desa.



Gambar 5. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Pendampingan SISKEUDES

Dari grafik terlihat bahwa tingkat kesalahan input transaksi turun drastis dari sekitar 80% menjadi hanya 30% setelah pendampingan. Keterlambatan laporan bulanan dan SPJ juga berkurang signifikan dari 70% menjadi 20%. Sementara itu, keterlibatan perangkat desa meningkat dari 40% ke 75%, menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berhasil mendorong lebih banyak perangkat aktif dalam siklus keuangan desa.

Temuan ini memperkuat bukti bahwa intervensi berbasis praktik (*learning by doing*) lebih efektif dibanding sekadar sosialisasi normatif. Dengan modul sederhana, simulasi kasus, dan latihan langsung, perangkat desa mampu bertransformasi dari kondisi minim pemahaman menjadi cukup kompeten dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES.

Kegiatan pendampingan ini memberikan pelajaran penting bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak dapat berjalan efektif apabila hanya mengandalkan penyediaan aplikasi semata, tetapi harus disertai dengan pendampingan yang bersifat praktis dan berkelanjutan. Dari sisi sumber daya manusia, proses asistensi terbukti mampu meningkatkan rasa percaya diri perangkat desa. Operator SISKEUDES lokal yang pada awalnya ragu dan bergantung pada pihak lain, secara bertahap mampu melakukan input transaksi serta menyusun laporan keuangan bulanan secara mandiri. Dari sisi sistem, aplikasi SISKEUDES menunjukkan tingkat kepraktisan yang tinggi ketika didukung oleh modul panduan sederhana yang disesuaikan dengan konteks lokal desa. Modul internal yang disusun selama kegiatan berfungsi sebagai jembatan antara ketentuan sistem nasional dan praktik administratif sehari-hari di desa.

Pendampingan ini juga berdampak pada aspek sosial organisasi pemerintahan desa, di mana keterlibatan dalam pengelolaan keuangan tidak lagi terpusat pada bendahara semata. Perangkat desa lain, seperti kaur, sekretaris desa, hingga staf pendukung, mulai memahami alur dan siklus keuangan desa secara lebih utuh. Dari perspektif kebijakan, model pelatihan berbasis praktik langsung dan partisipatif ini memiliki potensi besar untuk direplikasi oleh pemerintah kabupaten pada desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa, karena pendekatan tersebut terbukti mempercepat proses adopsi aplikasi dan meningkatkan kualitas pelaporan. Secara lebih luas, program ini berimplikasi pada penguatan akuntabilitas keuangan desa, penurunan potensi kesalahan pelaporan, serta peningkatan transparansi kepada publik. Selain itu, kegiatan ini menegaskan peran strategis perguruan tinggi yang tidak hanya berkontribusi dalam tataran konseptual, tetapi juga sebagai fasilitator teknis di lapangan. Kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam mendampingi perangkat desa menghasilkan sinergi yang memberikan manfaat nyata, baik bagi peningkatan kapasitas desa maupun pengayaan pengalaman pembelajaran di lingkungan akademik.

Hampir seluruh *gap* utama berhasil ditangani melalui asistensi, kecuali aspek infrastruktur yang masih perlu dukungan pemerintah daerah. Kegiatan ini menjadi model intervensi yang aplikatif untuk penguatan tata kelola keuangan desa melalui SISKEUDES.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada asistensi pengelolaan keuangan desa melalui penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Cibugel menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan partisipatif berbasis praktik langsung mampu menjawab permasalahan mendasar dalam tata kelola keuangan desa. Permasalahan awal berupa ketidakpastian operator, kesalahan pengkodean akun, keterlambatan penyusunan laporan realisasi dan SPJ, serta ketiadaan panduan operasional internal terbukti dapat diminimalkan melalui intervensi yang terstruktur, kontekstual, dan melibatkan perangkat desa secara aktif.

Hasil kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan kapasitas teknis dan kepercayaan diri perangkat desa dalam mengoperasikan SISKEUDES, khususnya dalam melakukan input transaksi, mengklasifikasikan akun belanja dan pendapatan secara tepat, serta menyusun laporan keuangan secara mandiri dan tepat waktu. Perbaikan kualitas pencatatan ini berdampak langsung pada meningkatnya akurasi laporan keuangan desa dan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas publik, sejalan dengan temuan berbagai studi yang menegaskan bahwa efektivitas SISKEUDES sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan intensitas pendampingan teknis.

Keberadaan modul internal SISKEUDES Desa Cibugel menjadi luaran strategis yang memperkuat memori institusional desa dan mengurangi ketergantungan pada individu tertentu. Modul ini berfungsi tidak hanya sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai instrumen standarisasi praktik pengelolaan keuangan desa. Selain itu, pendekatan partisipatif yang

diterapkan mendorong keterlibatan lintas perangkat desa, sehingga pengelolaan keuangan tidak lagi bersifat individual, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif organisasi desa.

Meskipun demikian, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia perlu diimbangi dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Keterbatasan perangkat komputer dan akses internet masih menjadi tantangan yang berpotensi menghambat keberlanjutan praktik pengelolaan keuangan desa berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan komitmen lanjutan dari pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur, menyelenggarakan pelatihan SISKEUDES secara berkelanjutan, serta menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa asistensi pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES yang dirancang secara partisipatif dan berbasis praktik nyata tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis perangkat desa, tetapi juga berkontribusi pada penguatan tata kelola keuangan desa yang transparan, tertib, dan akuntabel. Model pendampingan ini berpotensi direplikasi di desa-desa lain dengan karakteristik serupa dan dapat menjadi rujukan praktik baik dalam penguatan akuntansi sektor publik di tingkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Cibugel, khususnya Kepala Desa dan seluruh perangkat desa, yang telah memberikan dukungan, keterbukaan, dan fasilitasi selama pelaksanaan kegiatan asistensi pengelolaan keuangan desa dan aplikasi SISKEUDES. Apresiasi juga diberikan kepada perangkat desa yang telah berpartisipasi aktif dan kooperatif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga praktik penyusunan laporan keuangan. Terima kasih kepada tim pengabdian yang telah bekerja secara kolaboratif dan penuh komitmen dalam mendampingi proses pembelajaran di lapangan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata dan menjadi langkah awal bagi penguatan tata kelola keuangan desa yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L., & Nurabiah, N. (2024). *Determinants of Village Financial System (SISKEUDES) quality in Wanasaba sub-district*. East Asian Journal of Multidisciplinary Research, 4(1). <https://doi.org/10.55927/eajmr.v4i1.13367>
- Danial Kesa, D., Nurfikri, A., & Lee, C.-W. (2023). *Evaluation of the Village Financial Information System (SISKEUDES) in Enhancing Governance and Financial Transparency in Indonesian Village Administration*. Khazanah Sosial, 6(3). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ks/article/view/38933>
- Fadila, A. P. N., & Pravitasari, D. (2022). *Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Tanggunggunung, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 2(3). <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jakpg/article/view/2022>
- Gundul, P. (2025). *Village Financial Transparency: Evaluation of the Implementation of the Village Financial System in Improving Accountability in Village Fund Management*. Journal of Strategic Behaviour Accounting, 1(01). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsba/article/view/42080>
- Hafizoh, N., Rachmanita, V., Maulidya, W. S., Irsyadillah, K. P., & Anto, A. H. F. (2025). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan lingkungan melalui participatory action research. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 7(1), 14–30. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v7i1.24286>
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer. PDF Open Access (chapter): <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-4560-67-2.pdf>
- Khafsoh, N. A., & Riani, N. (2024). Implementation of participatory action research (PAR) in community service program. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 237–253. <https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.2034>
- Mahin, M. (2024). *Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Desa Rumbih, Kabupaten Kapuas Hulu*. FOKUS: Publikasi Ilmiah, 22(2). <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/view/1242>
- Ningsih, W., & Anggraeni, W. A. (2024). *The Role of the Village Financial System (Siskeudes) in Mediating the Relationship Between the Role of Village Apparatus and Accountability for Village Fund Management*. Jurnal Wacana Ekonomi, 23(1). <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JA/article/view/3604>

- Pramesti, T. B., Nuraina, E., & Sulistyowati, N. W. (2025). *Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, v1(2). <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jakpg/article/view/278>
- Salman, K. R. (2024). Akuntansi sektor publik: Konsep dan praktik pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, 12(1), 1–15. <https://journal.trunojoyo.ac.id/japi/article/view/22754>
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 12(1). <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/ekobis/article/view/1382>
- Trisnawati, R., Ahyani, F., & Ulfiati, N. (2024). *Determinants of the Quality of Village Financial Statements and the Implementation of SISKEUDES as Mediation Variables*. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(3). <https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i3.12814>

BIODATA PENULIS



Dr. Ali Tafriji Biswan, S.E., S.ST., Ak., M.Ak.

Dosen pada Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ). Beliau menyelesaikan pendidikan Diploma dan Sarjana Terapan Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Sarjana Manajemen di Universitas Terbuka, Magister Akuntansi di Universitas Indonesia, serta Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Negeri Jakarta. Bidang yang ditekuni meliputi akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, dan manajemen.